

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Barusjahe adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang merupakan ibukota Kecamatan Barusjahe yang menaungi 19 desa yang meliputi desa Rumamis, Semangat, Sinaman, Talimbaru, Pertumbuhan, Bulan Julu, Bulan Jahe, Sukanalu, Sukajulu, Barusjahe, Serdang, Penampen, Sarimanis, Tangkidik, Paribun, Sikab, Persadanta, Tanjung Barus dan Barusjulu. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. Statistik Daerah Kecamatan Barusjahe. 2015).

Barusjahe didirikan oleh orang yang bermarga Barus yang merupakan *merga* dari cabang Karo karu yang masuk dalam lima *merga* bangsa Karo (*Mergasilima*). Berdirinya suatu pemukiman di Barusjahe dapat dikaitkan dengan invasi beberapa suku yang disebut saat ini suku Karo. Invasi yang dilakukan memiliki motif untuk mempertahankan kehidupannya dengan melintasi tempat yang jauh untuk mencari makanan dan iklim yang dapat mendukung kelangsungan kehidupannya. Hidup yang berpindah pindah telah mempengaruhi pemikiran untuk mencari tempat yang sesuai untuk kehidupannya, yang kemudian memilih hidup menetap dan mendirikan suatu perkampungan (*Kuta*)

Seperti halnya pada suku di Indonesia orang Karo sebagian masih hidup di daerah pedesaan yang kemudian berkembang. Dikalangan orang batak ada beberapa pengertian yang menyatakan kesatuan teritorial di pedesaan itu ialah:

huta, kuta, lumban, sosor, bius, pertahian, urung dan pertumpukan. Payung Bangun dalam Koentjaraningrat (2007:98). Pada orang Karo kesatuan teritorial ini disebut *kesain* yang merupakan sekelompok rumah yang memiliki halaman bersama yang dikepalai oleh *merga* pendiri *kesain* yang kemudian akan berkembang menjadi *kuta* yang merupakan kelompok dari *kesain*, yang terdiri dari penduduk yang memiliki beberapa *merga* berbeda beda. Sebagai masyarakat yang berada di dataran tinggi Karo, terbentuknya suatu budaya menjadi panutan bagi masyarakat Karo dalam berhubungan dengan sang pencipta alam beserta isinya dan khususnya hubungan antara masyarakat di dalamnya, semua pola hubungan tersebut tertuang dalam sebuah aturan tidak tertulis yang disebut budaya.

Aspek budaya yang mana menurut Singarimbun dalam Tarigan (1989:3). merupakan identitas masyarakat Karo, disebutkan ada empat identitas meliputi *merga*, bahasa, kesenian dan adat istiadat. *Merga* merupakan identitas turunan yang didapat dari ayah (Patrilineal). *Merga* bagi suku Karo merupakan identitas yang paling utama dan setiap perkenalan dalam masyarakat. Di tiap tiap *kuta* di Tanah Karo *merga* tersebar, bercampur, berdiam, berumah adat, dan mempunyai hak buatan tanah yaitu sebagai yang *merga* di tuakan dinamakan *bangsa anak tanah*. Perkembangan masyarakat dengan masuknya *merga* lain yang ditandai dengan datangnya penduduk dari tempat lain, pernikahan dengan *merga* lain juga menyebabkan meluasnya perkembangan di suatu *kuta* tersebut. Masyarakat yang saling berinteraksi di lokasi Barusjahe dalam waktu yang lama telah menciptakan kesatuan dan identitas hingga menciptakan suatu sistem masyarakat.

Masyarakat menetap inilah yang menjadi awal mula berdiri suatu kampung, desa, kota bahkan menjadi suatu negara. Kuta Barusjahe terdapat personalia pemerintahannya beserta juga rakyatnya. Setiap kampung dipimpin oleh *perbapaan* atau *penggulu* yaitu marga yang mendirikan kuta yang dibantu *anak beru* yaitu ipar dari saudara perempuannya *pengulu* dan *senina* yaitu sepupu dari ayah yang diperluas pengertiannya saudara yang memiliki marga yang sama. Perkembangan kampung menyebabkan penduduk pindah dan mendirikan gubuk gubuk yang kemudian nantinya berkembang menjadi kampung yang baru di sekitar daerah Barusjahe, sehingga pemerintahannya seperti *pengulu*, *anak beru* dan *senina* sudah ada dikampung tersebut.

Perpindahan penduduk dari kampung induk disebabkan kurangnya areal perladangan dan perselisihan peperangan antar sesamanya dan mulai banyaknya pendatang. Inilah awalnya mulanya berdiri kampung kampung lain diluar Barusjahe, perpindahan penduduk tersebut masih memiliki kesatuan dan memiliki pertalian saudara dengan kampung induk, kemudian kampung-kampung yang berdiri tersebut tetap bertahan dengan pengaruh kampung terdahulunya yaitu kuta Barusjahe. Selanjutnya terbentuklah *Urung* yaitu federasi kuta yang merupakan persatuan kuta kuta yang berdiri diluar Barusjahe yang memiliki terikatan dengan kuta induknya, yang ditandai berdirinya urung si VII kuta berpusat di Barusjahe.

Barusjahe memperkuat pengaruh dan kekuasaannya ke semua kuta yang terikat dan terjalinlah hubungan antar kampung-kampung. Perluasan wilayah ditandai dengan bergabungnya urung si VI kuta yang berpusat di Sukanalu yang dipimpin oleh bermerga sitepu menjadi satu pemerintahan dibawah kekuasaan

Barusjahe. Bergabungnya urung ini disebabkan oleh peperangan dan diplomasi yang dilakukan urung Barusjahe dengan urung Sukanalu yang melahirkan daerah baru yang berbentuk kerajaan yang bernama Kerajaan Sibayak Barusjahe. Pada tahun 1898, Belanda melakukan intervensi di dataran Tinggi Karo dengan terjadi beberapa perlawanan di daerah Karo. Tepatnya pada tahun 1907, Barusjahe menandatangani perjanjian pernyataan pendek disebut *Korte Verklaring* yang menandakan Barusjahe takluk kepada Belanda dan mengakui negerinya bagian dari Hindia Belanda dan melaksanakan perintah yang diberi pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun sebelumnya 1906 setelah Karo dapat ditaklukkan menandai Karo berada dalam administrasi Belanda yang tertuang dalam *Besluit Gubernemen* tanggal 12-12-1906 no 2.2 diresmikan dataran Tinggi Karo.

Tanah Karo dan Simalugun dijadikan dalam satu Afdeling (Kabupaten) Simalungun dan Karolanden dalam Residen Sumatera Timur. Kemudian Barusjahe dijadikan sebagai *Landschape* (Swapraja) yang memiliki pemerintahan sendiri (*Zelfbestur*) yaitu kerajaan yang memiliki kekuasaan di wilayahnya disamping adanya empat swapraja lain yang berkuasa di *Onder Afdeling Karolanden*. Kerajaan Barusjahe berakhir pada pasca kemerdekaan, ketika dilakukan pertemuan raja-raja di Sumatera Timur dengan Gubernur Hasan perihal demokratisasi swapraja, pertemuan itu mempercepat terjadi Revolusi sosial di Tanah Karo oleh Badan Pejuang Indonesia pada Maret 1946. Berakhirnya pemerintahan Swapraja kemudian digantikan oleh pemerintahan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat, yang dimana Sumatera memiliki struktur pemerintahan Residen, Kabupaten dan Kecamatan ditandai dengan berdirinya tiga

Kewedanaan di Kabupaten Karo yaitu Kewedanaan Karo, Hilir, dan Jahe. Barusjahe menjadi Kecamatan dibawah Kewedanaan Karo kemudian beralih dibawah Kewedanaan Tigapanah sesuai surat keputusan residen pada tahun 1947.

Pada akhir November 1947 Belanda melakukan agresi militer di Karo dengan tujuan merebut kembali Indonesia yang telah merdeka, keberhasilan Belanda menguasai kembali Sumatera Timur, dibentuklah Negara Sumatra Timur (NST) buatan Van Mook, kemudian Kecamatan Barusjahe dijadikan daerah distrik yaitu *Districthoofd Van Barusjahe*. Pada tanggal 27 Desember 1949 Konferensi Meja Bundar (KMB) memberikan pemerintahan penuh terhadap RIS yang diakui NST, hingga memunculkan ATR (aksi Tuntutan Rakyat) yaitu aspirasi pemuda Tanah Karo untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia dan membubarkan NST. Aspirasi kemudian terpenuhi setelah kembalinya Indonesia ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUDS 1950, dengan terbentuknya NKRI, Pemerintahan membentuk kembali Kabupaten Tanah Karo yang terdiri dari dua Kewedanaan, Wedana Selatan dan Utara. Barusjahe masuk dalam Kewedanaan utara yang dipimpin seorang Camat, Babo Sitepu.

Kembalinya Barusjahe menjadi daerah Kecamatan ketika dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertahan hingga sampai saat ini sebagai pusat administrasi Pemerintahan Kecamatan Barusjahe. Oleh karena itu, kecamatan Barusjahe memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan sejarah di Karo dari awal berdirinya hingga terbentuknya menjadi salah satu Kecamatan di Tanah Karo. Maka Peneliti tertarik untuk menelitinya dengan judul ” **Sejarah Terbentuknya Kota Barusjahe**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Latar belakang berdirinya kerajaan Barusjahe yang menjadi embrio kota Barusjahe
2. Perkembangan Kerajaan Barusjahe pada masa kolonialisme Belanda
3. Proses terbentuknya Barusjahe sebagai ibukota Kecamatan Pasca Kemerdekaan

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang berdirinya kerajaan Barusjahe yang menjadi embrio kota Barusjahe
2. Bagaimana perkembangan kerajaan Barusjahe pada masa kolonialisme Belanda.
3. Bagaimana proses terbentuknya Barusjahe sebagai ibukota Kecamatan pasca kemerdekaan

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Kerajaan Barusjahe yang menjadi embrio kota Barusjahe
2. Untuk mengetahui perkembangan kerajaan Barusjahe pada masa kolonialisme Belanda
3. Untuk mengetahui proses terbentuknya Barusjahe sebagai ibukota Kecamatan pasca kemerdekaan

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana dicantumkan dibawah ini :

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pembaca terutama penduduk di Kecamatan Barusjahe
2. Sebagai menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang Sejarah Terbentuknya Kota Barusjahe
3. Sebagai bahan masukan yang dijadikan sumber informasi yang ingin meneliti tentang Sejarah Terbentuknya Kota Barusjahe
4. Sebagai pengembangan ilmu bagi peneliti sendiri dalam rangka pengembangan selanjutnya
5. Sebagai penambah pebendaharaan Perpustakaan UNIMED. khususnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah UNIMED.